

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 28 TAHUN 2011

TANGGAL : 14 September 2011

**RINCIAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL,  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
TAHUN ANGGARAN 2011**

NO.	URAIAN		VERIFIKATOR ADMINISTRATIF/ KOORDINATOR	VERIFIKATOR TEKNIS/ SKPD TERKAIT	RENCANA BELANJA (Rp)
<b>A.</b>	<b>Belanja Hibah</b>				<b>59.250.252.000</b>
	<b>A.1</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta</b>			<b>15.919.572.000</b>
	A.1.1	Belanja Hibah kepada Bidang Keagamaan			1.275.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	125.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Badan Amil Zakat (BAZ)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	4	Belanja Hibah kepada Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	150.000.000
	5	Belanja Hibah Sertifikasi Tanah Wakaf	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	100.000.000
	6	Belanja Hibah Transportasi Pemberangkatan Haji	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	200.000.000

	7.	Belanja Hibah Pengiriman Kafilah MTQ	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	250.000.000
	8.	Belanja Hibah kepada Masjid Agung Kepanjen	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	250.000.000
	A.1.2	Belanja Hibah kepada Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			9.450.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) dan Cabang Olah Raga	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.800.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	150.000.000
	3	Belanja Hibah kepada Organisasi Kepemudaan/KNPI	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000.000
	A.1.3	Belanja Hibah kepada Bidang Keprofesian			500.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	500.000.000
	A.1.4	Belanja Hibah kepada Bidang Kesehatan			1.900.000.000
	1	Belanja Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	1.000.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	350.000.000

	3	Belanja Hibah kepada Badan Narkotika Kabupaten (BNK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	500.000.000
	4	Belanja Hibah kepada Yayasan Jantung Sehat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	50.000.000
	A.1.5	Belanja Hibah kepada Bidang Peranan Wanita			1.750.140.000
	1	Belanja Hibah kepada Organisasi Wanita	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000
	2	Belanja Hibah kepada Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000.000
	3.	Belanja Hibah kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.140.000
	A.1.6	Belanja Hibah kepada Bidang Sarana Prasarana			1.044.432.000
	1		Bagian Pertanahan	Dinas Kehutanan	58.000.000
	2		Bagian Kerjasama	Dinas Kehutanan	933.000.000
	3.	Belanja Hibah Biaya Nilai Tegakan kepada Perum. Perhutani	Bagian Kerjasama	Dinas Kehutanan	53.432.000
	<b>A.2</b>	Belanja Hibah Biaya Investasi JLS kepada Perum. Perhutani			<b>13.310.850.000</b>

A.2.1	Belanja Hibah Pendampingan Program kepada Kelompok Masyarakat			11.560.850.000
1	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perdesaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	5.680.000.000
2	Belanja Hibah PNPM Mandiri Perkotaan	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	3.145.000.000
3	Belanja Hibah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM)	Bagian Perekonomian	Badan Pemberdayaan Masyarakat	606.000.000
4	Belanja Hibah Pengembangan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	60.000.000
5	Program Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) kepada Kelompok Masyarakat (Bantuan Provinsi)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan	150.000.000
6	Belanja Hibah Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Bagian Kerjasama	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	41.400.000
7	Belanja Hibah kepada Koperasi untuk Anggota Peternak Sapi Perah	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	465.000.000
8	Program Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PPUED)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	10.000.000
9	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	75.000.000
10	Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan (PDM-BKP)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	90.000.000
11	Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Masyarakat Desa/Kelurahan (PKPKM)	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000
12	Belanja Hibah DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	1.089.500.000

	13	Belanja Hibah Pendamping DAK Program Sanitasi Berbasis Masyarakat	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	108.950.000
	14	Belanja Hibah Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian Berimbang	Bagian Kerjasama	Kantor Perumahan	20.000.000
	15	Belanja Hibah untuk Modal Kerja Koperasi/Kelompok Korban PHK Industri Rokok dan Masyarakat, di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	Bagian Perekonomian	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1.750.000.000
	<b>A.3</b>	<b>Belanja Hibah Bidang Pendidikan</b>			<b>29.769.830.000</b>
	A.3.1	Belanja Hibah kepada Satuan Pendidikan			29.769.830.000
	1	Belanja Hibah Pendampingan Program Rintisan Wajar Dikmen 12 Tahun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.104.360.000
	2	Belanja Hibah Dana BOS SD/SDLB Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.283.630.000
	3	Belanja Hibah Dana BOS SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	21.381.840.000
	<b>A.4</b>	<b>Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal</b>			<b>2.000.000.000</b>
	1	Belanja Hibah untuk Menunjang Kegiatan Pemerintah Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Fungsional dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi	2.000.000.000
<b>B.</b>		<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			<b>63.951.059.000</b>
	<b>B.1</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>			<b>63.951.059.000</b>

B.1.1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan			63.951.059.000
1	Bantuan Keuangan kepada Perguruan Tinggi	Bagian Kerjasama	Badan Perencanaan Pembangunan	300.000.000
2	Bantuan Keuangan untuk Keagamaan	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial	525.000.000
3	Bantuan Keuangan kepada Lembaga Pendidikan Swasta	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Kantor Kementerian Agama	500.000.000
4	Bantuan untuk Menunjang Kemitraan Pemerintah Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	35.000.000.000
5	Bantuan Keuangan untuk Insentif Posyandu (13.655 Kader x 9 bulan x Rp. 12.000,-)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan	1.474.740.000
6	Bantuan Keuangan untuk Tambahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial	3.900.000.000
7	Bantuan Keuangan pada Tempat Ibadah dan Pondok Pesantren	Bagian Bina Mental dan Kerohanian	Dinas Sosial, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.000.000.000
8	Bantuan Keuangan untuk Kesejahteraan Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	1.000.000.000
9	Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Kesenian Budaya	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	760.000.000

10	Bantuan Keuangan untuk Guru Tidak Tetap dan PTT yang ada di Sekolah (Insentif) 1.508 orang x Rp.500.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	754.000.000
11	Bantuan Keuangan untuk Penyandang Masalah Sosial	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial	500.000.000
12	Bantuan Keuangan untuk Organisasi Kemasyarakatan	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga	500.000.000
13	Bantuan Keuangan untuk Olah Raga Masyarakat	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pemuda dan Olahraga	250.000.000
14	Bantuan Keuangan untuk Guru terpencil (Rp.600.000,- x 162 orang x 1 tahun)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	97.200.000
15	Bantuan Keuangan untuk Guru TK Swasta	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	1.783.500.000
16	- Bantuan UAS SD/MI 38.559 Siswa x Rp. 27.000,- - Bantuan UAS SMP/MTs 32.406 Siswa x Rp. 36.000,- - Bantuan UAS SMA/SMK/MA 7.560 Siswa x Rp. 80.000,- - Dana Pengembangan Sekolah (BOP SMP Satap) 28 Sekolah x Rp. 65.000.000,-	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	4.632.509.000
17	Bantuan Ongkos Jahit Pakaian Posyandu (Rp. 50.000,- x 14.000 orang)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	700.000.000
18	Bantuan Keuangan pada Guru Swasta (Bantuan Provinsi)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Dinas Pendidikan	8.674.110.000

	19	Bantuan Tali Asih bagi PNS yang Pensiun	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Badan Kepegawaian Daerah	600.000.000
<b>C.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>				<b>13.388.917.039</b>
	<b>C.1</b>	<b>Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa</b>			<b>13.388.917.039</b>
	C.1.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa			12.224.828.500
	1	Belanja Bagi Hasil atas perhitungan Pajak Penerangan Jalan Desa/Kelurahan	Bagian Perekonomian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset	12.224.828.500
	C.1.2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa			1.164.088.539
	1	Belanja Bagi Hasil Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	990.000.000
	2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Terminal Landungsari dengan Desa Tahun 2011	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	70.000.000
	3	Kekurangan Belanja Bagi Hasil TPI ke Koperasi dan Provinsi Jatim Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.078.039
	4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan STA Mantung dengan Desa Tahun 2011	Bagian Perekonomian	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.000.000



	5	Belanja Bagi Hasil TPI ke KUD Mina Jaya (Kekurangan Tahun 2009)	Bagian Perekonomian	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.270.500
	6	Belanja Bagi Hasil Kerjasama Pasar Bakroto Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading	Bagian Perekonomian	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar	25.740.000
<b>D.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa</b>				<b>96.707.568.000</b>
	<b>D.1</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa</b>			<b>95.982.568.000</b>
	D.1.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa			95.982.568.000
	1	Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	55.000.000.000
	2	Bantuan Tunjangan Tetap Perangkat Desa:			
	-	Kepala Desa : 1 org x 378 Desa x 12 Bln x Rp. 1.203.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	5.456.808.000
	-	Perangkat Desa : 3.615 Org x 12 Bln x Rp. 802.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	34.790.760.000
	-	Pemberian Tali Asih Purna Tugas dan Uang Duka Kepala Desa / Perangkat Desa	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Badan Kepegawaian Daerah	435.000.000
	3	Bantuan Penyelenggaraan Pilkades untuk 28 Desa @ Rp.6.000.000,-	Bagian Tata Pemerintahan Desa	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset	300.000.000
	<b>D.2</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>			<b>725.000.000</b>
	D.2.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik			725.000.000

	1	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Bagian Tata Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	725.000.000
<b>E.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>				<b>2.500.000.000</b>
	<b>E.1</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>			<b>2.500.000.000</b>
	E.1.1	Belanja Tidak Terduga			2.500.000.000
	1	Belanja Tidak Terduga	Bagian Administrasi Pembangunan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.500.000.000

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

